

Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengembangan Masyarakat di Komunitas Miskin Perkotaan

Kania Saraswati Harisoesyanti¹, Annisah²

^{1,2}Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia, Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok,
Jawa Barat 16424

Corresponding Author: kaniasaraswati@ui.ac.id

ABSTRAK

Kompleksitas masalah di perkotaan tidak cukup hanya diatasi secara sektoral, tetapi butuh kerjasama dari berbagai stakeholder; pemerintah, NGO, perguruan tinggi, dan masyarakat. Pengembangan masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengatasi kompleksitas masalah ini. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi menjadi faktor penentu keberhasilan program pengembangan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran penting partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan masyarakat di komunitas perkotaan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi di Kampung Cikini-Ampium, Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan masyarakat yang dijalankan di wilayah ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan ruang bermain bagi anak dengan memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia yaitu Rumah Pintar. Namun demikian, upaya pengembangan masyarakat ini tidak dapat berjalan secara maksimal karena minimnya partisipasi masyarakat setempat. Kurangnya kesadaran akan manfaat dari Rumah Pintar dan konflik antar warga sebagai faktor utama minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan berbagai upaya pendekatan sebelum penerapan program pengembangan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan pengembangan masyarakat dapat berkelanjutan.

ABSTRACT

The complexity of problems in urban areas is insufficient to solve only sectorally, but it requires cooperation from various stakeholders, the government, NGOs, universities, and the community. Community development is one way of dealing with the complexity of this problem. Previous studies have shown that participation is a determining factor for the success of community development programs. This paper aims to explain the important role of community participation in the community development process in urban communities. This research was conducted qualitatively by collecting data through in-depth interviews, focus group discussions, and observations in Cikini-Ampium Village, Pegangsaan Village, Central Jakarta. The results showed that the community development efforts carried out in this area were aimed at overcoming the problem of limited space for children to play by utilizing the available public facilities, namely Rumah Pintar. However, these community development efforts could not run optimally due to the lack of local community participation. Lack of awareness of the benefits of Rumah Pintar and conflicts between group residents are the main factors for the lack of community participation. Therefore, it is important to make various approaches before the implementation of community development program so that people become more actively participate in the community development process till community needs can be met and the community development can be sustainable.

Kata Kunci:

Pengembangan masyarakat,
partisipasi, keberlanjutan, komunitas
miskin urban

Keywords:

community development, participation,
sustainability, urban poor communities

PENDAHULUAN

Tingginya gap pembangunan antara kota dan desa menjadi salah satu penyebab tingginya urbanisasi. Berdasarkan data dari BPS, wilayah seperti DKI Jakarta dan juga Jawa Barat menjadi salah satu tujuan utama urbanisasi. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2018, di Jakarta jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai 10.467.630 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 15.804 jiwa/km². Berikut disajikan tabel proyeksi jumlah penduduk perkotaan tingkat nasional.

	Tahun					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
INDONESIA	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi perkotaan yaitu kemiskinan. Berdasarkan laporan dari Bank Dunia disebutkan bahwa ada sejumlah kondisi dari kemiskinan perkotaan di Indonesia, diantaranya: kepemilikan dan akses terhadap tanah yang sulit dan sangat terbatas; rumah memiliki fungsi ganda dan terkait kepemilikannya sangat beresiko bahkan ilegal; tingkat pendidikan keluarga sangat rendah; ketergantungan hidup keluarga cukup besar; kondisi lingkungan buruk yang beresiko terhadap berbagai penyakit dan akses kesehatan yang sangat rendah; status pekerjaan tidak menentu dan pengangguran yang tinggi; akses ke fasilitas dasar perkotaan sangat terbatas (Kamaluddin, 2004).

Permasalahan yang muncul dari kondisi pemukiman padat di perkotaan sangatlah kompleks, terlebih pada pemukiman yang padat dan kumuh. Walaupun terjadi penurunan populasi yang tinggal di permukiman kumuh perkotaan di negara berkembang antara tahun 2000 (39%) dan tahun 2014 (30%), jumlah ini dapat terus bertambah dan tantangan keberadaan permukiman kumuh tetap menjadi salah satu faktor dalam keberlanjutan kemiskinan di dunia (UN Habitat, 2015). Hal ini dikarenakan adanya tantangan terberat dalam menjalani kehidupan di perkotaan, yakni tidak menentunya pendapatan, sulitnya mencari pekerjaan, dan mahal biaya pendidikan (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 2013).

Kepadatan penduduk berdampak buruk terhadap anak-anak. Salah satu dampaknya yaitu, lingkungan yang tidak layak huni bagi anak-anak (Caritra, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang tinggal di pemukiman padat penduduk rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikologis, dan verbal. Kekerasan pada anak ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak untuk hidup, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan karena dapat menyebabkan putus sekolah (Rahayu, 2017). UNICEF (2018) melaporkan bahwa diperkirakan 300 juta populasi global penghuni permukiman kumuh adalah anak-anak, dimana mereka menderita berbagai kekurangan, hidup tanpa suara dan tidak memiliki akses ke tanah, perumahan dan layanan, kurangnya ruang publik. Hal ini menyebabkan lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman, pilihan yang terbatas untuk bermain, hingga menyebabkan terbatasnya jaringan sosial, layanan, dan ekonomi lokal.

Berdasarkan ulasan tersebut, diketahui bahwa kondisi kemiskinan di perkotaan sangat kompleks dan berdampak sangat buruk terhadap anak-anak. Oleh karena itu, butuh intervensi yang bersifat holistik dan melibatkan berbagai stakeholder mulai dari pemerintah tetapi juga dari berbagai stakeholder seperti NGO, Perusahaan, Perguruan Tinggi, dan masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi yaitu melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma.

Salah satu bentuk upaya pemenuhan kebutuhan ruang untuk bermain di lingkungan padat penduduk seperti yang dilakukan oleh Universitas Indonesia bekerja sama dengan Chiba University. Upaya yang dilakukan yaitu membangun fasilitas Rumah Pintar yang ditujukan untuk kegiatan bersama warga, terutama sebagai tempat belajar dan bermain yang aman untuk anak-anak yang tinggal di Kampung Cikini-Ampiun, Jakarta.

Pengembangan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui partisipasi dan inisiatif dari masyarakat (Adi, 2013). Dalam menjalankan pengembangan masyarakat, salah satu faktor yang sangat berpengaruh yaitu partisipasi aktif dari masyarakat mulai dari tahap awal hingga akhir. Dari kajian sebelumnya ditemukan bahwa tidak adanya partisipasi masyarakat menyebabkan tujuan pengembangan masyarakat tidak tercapai (Macdonald, 2017). Dalam tulisan ini, akan dikaji lebih lanjut mengenai peran partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Rumah Pintar yang berlokasi di Kampung Cikini-Ampiun, Jakarta sebagai upaya pemenuhan hak anak.

Perumusan Masalah

Upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan di Kampung Cikini Ampiu, khususnya di RT X RW Y Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat oleh Universitas Indonesia dan Chiba University, Jepang telah berlangsung cukup lama. Pada awalnya, fokus utama dari kegiatan pengembangan masyarakat pada lingkungan kumuh dan padat ini adalah membangun berbagai fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh warga setempat. Salah satu fasilitas yang dibangun yaitu Rumah Pintar. Rumah Pintar didirikan sejak tahun 2013 di atas sebuah lahan kosong bekas terjadinya kebakaran. Pembangunan rumah pintar ini dilakukan pasca kebakaran terjadi atau yang disebut *after fire project*.

Rumah pintar ini ditujukan untuk kepentingan warga terutama RT X, baik untuk sekretariat RT, kegiatan bersama warga, dan tempat belajar dan bermain anak-anak. Namun demikian, pemanfaatan rumah pintar hingga awal tahun 2015 belum maksimal, hanya sebatas untuk kegiatan perpustakaan keliling yang dilakukan organisasi Jakarta-Japan Network (J2Net) yang dilakukan setiap hari Sabtu mulai pukul 09.30-11.30. Berdasarkan informasi yang didapat, bangunan tersebut dibiarkan kosong dan cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan negatif pada hari lainnya. Selanjutnya, Tim dari Universitas Indonesia berupaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan metode pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan rumah pintar. Namun demikian, dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat ditemui sejumlah kendala dan berdampak pada tidak tercapainya tujuan kegiatan. Faktor utama yang menyebabkan tujuan pengembangan masyarakat tidak terwujud yaitu minimnya partisipasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut apa penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan masyarakat di Kampung Cikini Ampiu, Jakarta?

TELAAH LITERATUR

Pengembangan Masyarakat

Menurut Brokensha dan Hodge (1969 (Adi, 2013) pengembangan masyarakat merupakan suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui partisipasi dan inisiatif dari masyarakat (h. 150). Pengembangan masyarakat mengacu pada proses, tugas-tugas, praktek, dan tujuan untuk memberdayakan komunitas dalam mengambil tanggung jawab bersama untuk pengembangan mereka (Kenny, 2006). Sementara itu, (Ross & Lappin, 1967) mendefinisikan istilah pengembangan masyarakat sebagai suatu program, teknik, pendekatan yang bergantung kepada komunitas lokal.

Tujuan utama dari pengembangan masyarakat yaitu menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahannya. Lebih lanjut, (Kenny, 2006) menjelaskan bahwa tujuan dari pengembangan masyarakat yaitu untuk memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol yang efektif terhadap nasib mereka sendiri. Kontrol yang efektif membutuhkan pengembangan yang dilakukan secara terus menerus dimana masyarakat dapat mengidentifikasi dan mengatasi isu, kebutuhan, dan masalah yang mereka hadapi. Kontrol masyarakat yang efektif membutuhkan sumber daya, termasuk pendapatan, sumber daya material, pengetahuan dan keterampilan yang kuat. Fokus dari pengembangan masyarakat yaitu pentingnya perubahan dalam masyarakat. (Kenny, 2006). Dengan memanfaatkan bantuan dari luar, proses ini tetap yang lebih menentukan yaitu usaha dari komunitas setempat secara terorganisir sehingga dapat meningkatkan kondisi dasar kehidupan dari komunitas tersebut (pemenuhan kebutuhan materil-non materil) (Ross & Lappin, 1967).

Model pengembangan komunitas berfokus pada kemampuan memfasilitasi kelompok dalam memperoleh keterampilan dan keyakinan untuk meningkatkan kualitas hidup para anggotanya. Karakteristik model pengembangan komunitas ini adalah: 1) bekerja pada level lingkungan keluarga; 2) fokus pada proses, yakni kelompok-kelompok didorong untuk dapat mengartikulasikan masalah dan kebutuhan mereka; 3) target capaian: adanya tindakan kolektif (*collective action*) yang dapat menyelesaikan masalah dan kebutuhan komunitas (Poppo, 1995).

Proses Pengembangan Masyarakat

Prinsip dasar dari pengembangan masyarakat yaitu “perubahan berasal dari bawah” dan prinsip ini berkorelasi sangat erat dengan prinsip dasar berikutnya yaitu pengembangan masyarakat yang menekankan pada proses (Ife, 2013). Untuk itu, ada sejumlah tahapan pengembangan masyarakat yang dilakukan. Setidaknya ada tujuh tahapan, diantaranya: (Adi, 2013):

1. Persiapan

Dalam tahap persiapan, secara umum ada dua hal yang dilakukan, persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim. Proses ini menjadi semakin krusial ketika petugas memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sementara itu, persiapan lapangan yang dilakukan oleh petugas yaitu: studi kelayakan lokasi, melakukan perizinan pada pihak terkait, menjalin relasi dengan tokoh informal di wilayah tersebut, dan juga kontak serta kontrak awal dengan kelompok sasaran.

2. Asesmen

Yang dilakukan di tahap ini berupa: identifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk melakukan asesmen dapat menggunakan analisis SWOT. Asesmen dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Teknik yang dapat digunakan berupa *Participatory Learning and Action* (PLA).

3. Perencanaan Alternatif Program

Di tahap ini, *community worker* berupaya untuk melibatkan masyarakat setempat dalam memikirkan mengenai masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya. Program dan kegiatan yang dikembangkan, harus mengacu pada tujuan dan harus terencana sehingga tidak muncul program-program yang sifatnya insidental atau charity. *Community worker* lebih banyak berperan sebagai fasilitator.

4. Pemorfulasian Rencana Aksi

Sama seperti halnya tahap sebelumnya, di tahap ini juga partisipasi aktif dari masyarakat sangat menentukan bagaimana keberhasilan dalam memformulasikan rencana aksi. Di sini, petugas berkontribusi besar dalam memfasilitasi kelompok-kelompok mengembangkan rencana

program dan kegiatan. Termasuk di dalamnya menuangkan gagasan tersebut dalam sebuah proposal dan diajukan ke donor.

5. Pelaksanaan (Implementasi) Program

Tahap ini merupakan tahap paling krusial. Petugas berperan besar dalam memastikan bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun, meminimalisir pertentangan antar kelompok yang dapat menghambat pelaksanaan program kerja. Dan yang terpenting adalah adanya kader dari masyarakat setempat yang dapat meneruskan program meskipun sudah tidak ada petugas.

6. Evaluasi Proses dan Hasil Perubahan

Partisipasi masyarakat juga sangat penting di tahap ini karena dengan adanya partisipasi dari mereka akan menghasilkan pengawasan/kontrol internal. Jika ini dilakukan dapat menjadikan mereka lebih mandiri. Jika hasil evaluasi tidak sesuai harapan, dapat digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan program.

7. Terminasi

Pada tahap ini merupakan bentuk “penyelesaian” program secara formal. Terminasi seringkali dilakukan bukan karena masyarakat telah berubah atau masyarakat telah dianggap mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Seringkali terminasi dilakukan karena waktu sudah selesai, dana telah selesai, atau sudah tidak ada lagi penyandang dana.

Dalam tahapan ini, yang perlu diingat bahwa tahap ini merupakan siklikal artinya dapat berputar seperti sebuah siklus yang berputar seperti spiral. Sangat mungkin ketika telah mencapai satu tahap kemudian kembali ke tahap berikutnya. Ada keluwesan tahapan yang menjadi karakteristik dari pengembangan masyarakat.

Kendala Proses Pengembangan Masyarakat

Menurut Adi (2013) kendala dalam pengembangan masyarakat secara umum ada 3: pelaku perubahan, internal komunitas, dan eksternal komunitas. Kendala dari internal komunitas dibedakan menjadi 5 jenis: faktor predisposisi, kebiasaan dari komunitas sasaran, ketergantungan komunitas sasaran terhadap orang lain, pengalaman keberhasilan terdahulu, dan pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu. Faktor predisposisi menurut Green dan Kreuter (1991, dalam Adi, 2013) merupakan sesuatu yang muncul sebelum perilaku itu terjadi dan menjadi landasan terhadap perilaku yang dimunculkan oleh seseorang. Faktor predisposisi berupa: pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, dan persepsi dari komunitas sasaran. Faktor berikutnya yaitu kebiasaan dari komunitas sasaran. Setiap individu pasti memiliki kebiasaan tertentu yang sudah melekat. Kebiasaan yang ada di komunitas sasaran dapat membantu mempercepat perubahan tetapi bisa juga menghambat perubahan. Menghambat ketika program yang dilakukan bertentangan dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Ketergantungan komunitas terhadap orang lain menjadi faktor penghambat lainnya karena ini akan menyulitkan proses pemandirian masyarakat. Padahal, tujuan dalam pengembangan masyarakat selain untuk meningkatkan kualitas hidup juga pemandirian masyarakat dalam mengatasi masalahnya. Faktor lainnya yang juga berpengaruh yaitu ketika upaya mengatasi masalah yang sebelumnya berhasil, ketika diberikan metode/cara baru cenderung akan resisten karena menganggap yang lama sudah berhasil jadi tidak butuh perubahan. Yang terakhir yaitu pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu. Pengalaman traumatik yang pernah dialami oleh suatu komunitas akan menghambat perubahan karena masyarakat takut melakukannya.

Partisipasi Masyarakat

Sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan masyarakat, antara lain: kemampuan masyarakat dalam mengenali masalah yang mereka hadapi; adanya keinginan serta keikutsertaan masyarakat dalam mencari berbagai alternatif pemecahan masalah; keterlibatan dari masyarakat itu sendiri dalam usaha kesejahteraan sosial; dan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat (Sumarnonugroho, 1991).

Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dari proses pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam program pengembangan masyarakat merupakan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta melakukan evaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2013, h. 230).

Keterlibatan masyarakat dibutuhkan dalam setiap tahap, mulai dari awal hingga akhir proses pengembangan masyarakat. Bentuk keikutsertaan masyarakat ini ada dalam tiga tahap: partisipasi dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*), partisipasi dalam tahap pelaksanaan (*implementing stage*) dan terakhir partisipasi dalam pemanfaatan (*utilization stage*) (Slamet, 1994). Cohen & Uphoff (1980) sebelumnya juga telah menjelaskan jenis partisipasi yang perlu diperhatikan adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi, kebermanfaatan dan evaluasi. Melihat proses pengembangan masyarakat yang telah dijelaskan di atas, sesungguhnya partisipasi terletak pada setiap tahapan. Untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat, Bickman, Rifkin, dan Shrestha (1989, Adi, 2013) menjelaskan ada beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur, yaitu: proses pengidentifikasi kebutuhan; kepemimpinan; organisasi; manajemen; dan kemampuan memobilisasi sumber daya.

Tantangan Partisipasi dalam Pengembangan Masyarakat

Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan tantangan yang berbeda-beda, termasuk dalam membangun partisipasi. Mayo (1997) menyatakan bahwa kemitraan dapat mendorong partisipasi masyarakat, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan. Akan tetapi, kemitraan juga dapat menimbulkan ketidakberdayaan pada komunitas dan juga para profesional yang terlibat di dalamnya. Kemitraan ini perlu dipelihara dan didukung secara teratur dan berkelanjutan jika ingin bertahan dan berkembang.

Kemitraan ini juga ditunjukkan dengan adanya hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat. Tantangan ini dapat tergambar dari hubungan antara pemerintah lokal dengan masyarakat yang dapat terlihat dari pengendalian sumber daya dan bagaimana pendefinisian peran yang dapat menimbulkan konflik diantara mereka. Kegagalan berpartisipasi juga seringkali terjadi karena sedikitnya waktu yang dihabiskan untuk kegiatan di dalam masyarakat, dan minimnya keterampilan staf dalam mendorong inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi (Pozzoni & Kumar, 2005).

Keberadaan dan keterlibatan pemimpin di masyarakat (*community leader*) juga perlu ditunjukkan melalui kemampuan mereka dalam memperluas kesempatan yang luas bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi. Masuk ke dalam komunitas secara langsung dan bukan hanya menunggu masyarakat datang kepadanya, pemimpin haruslah mereka yang dihormati dan memiliki pengetahuan tentang komunitasnya. Kemampuan pemimpin terlihat dari bagaimana mereka menjalin hubungan (kontak dan koneksi) dan diskusi yang efektif dengan anggota masyarakat. Pemimpin masyarakat, yang dapat digambarkan melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama, setempat dapat berupaya membantu mencari masukan, menanggapi masalah serta peluang di tingkat komunitas sebagai bagian dari upaya perancangan program berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat (Blejwas (2010); Kretzmann & Puntteney (2010))

Selain itu pula, waktu merupakan sumber daya yang seringkali terlupakan. Cohen (1980) menyatakan bahwa untuk mempengaruhi jumlah partisipasi dibutuhkan waktu. Ketersediaan waktu menjadi hal yang sangat signifikan dalam menjalin hubungan yang berkualitas dengan anggota masyarakat yang dapat membantu memahami tentang prioritas serta kebutuhan masyarakat. Tanpa pemahaman yang berdasarkan hubungan yang kuat partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat yang berkelanjutan tidak mungkin terjamin (McDonald, 2017). Akan tetapi Mayo (1997) mengingatkan bahwa pendekatan dengan masyarakat yang sangat memakan waktu ini dapat berpotensi munculnya perselisihan kepentingan berbagai pihak di masyarakat.

Partisipasi masyarakat terkait dengan tindakan dan keterlibatan masyarakat, dan hal ini merupakan kerja keras untuk mewujudkan kemampuan dalam mendorong perubahan dan membentuk ikatan yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui keterlibatan masyarakat yang menyadari pentingnya partisipasi, akan mempermudah upaya para agen perubah untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan (Wise & Clark, 2018)

METODE

Untuk menguraikan penyebab minimnya partisipasi masyarakat pada proses pengembangan masyarakat di Kampung Cikini-Ampiun, Jakarta, penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan penelitian tindakan (*action research*). Penelitian tindakan merupakan penelitian terapan yang menggunakan pengetahuan sebagai bentuk kekuatan dan menghapus batas antara penelitian dan tindakan sosial. Beberapa ciri umum dari penelitian tindakan yang biasa dilakukan diantaranya: orang yang diteliti berpartisipasi aktif dalam proses pencarian; penelitian menggabungkan penelitian biasa atau pengetahuan populer; penelitian fokus pada pemberdayaan; penelitian untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan yang tumbuh secara langsung tumbuh dari keterlibatan aktivitas social politik (Neuman, 2014a, 2014b).

Dalam penelitian tindakan yang dilaksanakan selama 10 bulan ini, ada tiga tahap yang dilakukan yaitu: *look*, *think*, dan *act*. Pada tahap *look*, peneliti bersama masyarakat melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, sumberdaya, dan juga potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Stringer, 2007). Pada tahap ini, yang menjadi fokus utama yaitu sejarah dan pemanfaatan Rumah Pintar di Kampung Cikini-Ampiun, Jakarta. Untuk mendapatkan berbagai informasi ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kombinasi wawancara mendalam, *focus group discussion*, observasi, penyebaran kuesioner dan studi literatur. Yang menjadi partisipan diantaranya: pengurus RT, Ketua RT X, kader, pemuda, tokoh masyarakat, ibu-ibu warga RT X, akademisi, dan pengurus J2Net.

Tahap selanjutnya yaitu *think*, peneliti bersama dengan masyarakat sasaran bersama-sama melakukan interpretasi dan analisis data yang telah diperoleh dari tahapan *look*. Dalam prakteknya, pada tahap ini proses interpretasi dan analisis dilakukan secara bertahap dan yang lebih dominan adalah peneliti. Tahap ini menghasilkan kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan untuk tahap selanjutnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan tahap *act*, yang terdiri dari: perencanaan dan implementasi program sebagai solusi atas permasalahan yang ada (Stringer, 2007). Pada kegiatan perencanaan berfokus untuk menjawab pertanyaan dasar 5W+1H. *What*, mengenai apa yang menjadi permasalahan dan apa yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada. *Why*, yaitu mengenai alasan pemilihan alternatif solusi dibandingkan alternatif lainnya. *Who*, terkait siapa saja yang akan melakukan, *when* terkait kapan dilakukan, dan *where* mengenai dimana akan dilakukan. Kelima pertanyaan ini ditambah satu lagi terkait *how*, bagaimana perencanaan ini akan dilakukan. Ketiga tahap ini dilakukan secara berulang yang digambarkan dalam bentuk sebuah spiral yang artinya setelah satu rangkaian tahap ini selesai dilakukan kemudian dilanjutkan kembali dengan tahap *re-look*, *rethink*, dan *re-act*.

Data yang diperoleh dilakukan analisis secara bertahap melalui pengorganisasian data, pengolahan data, penafsiran data, dan kesimpulan. Pada tahap pertama, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, FGD, maupun penyebaran kuesioner, diorganisir dan diseleksi sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari tahap ini, dilakukan kategorisasi dan *coding* sehingga proses analisis data menjadi lebih mudah. Tahap selanjutnya yaitu penafsiran data dengan cara mengidentifikasi data yang telah terorganisir dan mengaitkannya dengan kerangka teori. Terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan lapangan dan pembahasan. (Neuman, 2014b).

HASIL

Proses Pengembangan Masyarakat di Cikini Ampion

Seperti yang telah dikemukakan dalam bagian kerangka teori, bahwa pengembangan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kondisi kualitas hidup masyarakat dan masyarakat mampu mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dengan menekankan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Demikian juga dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan pada penelitian ini, bahwa tujuan utamanya berupa terpenuhinya hak anak terkait ruang bermain dan belajar melalui optimalisasi pemanfaatan Rumah Pintar. Untuk mencapai tujuan ini, ada sejumlah proses yang dilakukan.

Dalam proses pengembangan masyarakat, Adi (2013) menjelaskan bahwa ada 7 tahap intervensi yang dilakukan. Ketujuh tahap ini telah dilakukan oleh tim tetapi dalam artikel ini diuraikan lebih lanjut hingga ke tahap enam, yaitu evaluasi hasil. Tahap pertama yang dilakukan yaitu persiapan, baik persiapan tim maupun persiapan lapangan. Persiapan tim dilakukan dengan mengidentifikasi potensi pengabdian, konsolidasi dengan tim pengabdian masyarakat lain yang berasal dari Universitas Indonesia yang sebelumnya melakukan program di wilayah ini dan bekerja sama dengan berbagai tim lain yang juga melakukan kegiatan di tahun yang sama. Sementara itu, persiapan lapangan dilakukan dengan melakukan perizinan ke Pemerintah setempat mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan Pegangsaan Timur, dan Walikota Jakarta Pusat. Selain itu, dilakukan juga pendekatan dengan berbagai organisasi yang telah ada dan bekerja di wilayah ini seperti PAUD, PKK, Karang Taruna, dan Jakarta Japan Network (J2Net) serta berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah setempat. Apa yang dilakukan oleh tim di tahap persiapan ini telah mencakup beberapa komponen kunci seperti yang disampaikan oleh (Adi, 2013) yaitu persiapan dari tim maupun persiapan lapangan. Kegiatan persiapan meliputi kegiatan administratif dan juga koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Kegiatan dilanjutkan dengan asesmen, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan, permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh wilayah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, penyebaran kuesioner, dan diskusi kelompok bersama kader, J2Net, mahasiswa yang berasal dari Jepang (yang terlibat dalam kegiatan di Rumah Pintar), serta pengurus RW, diketahui ada beberapa permasalahan terkait pemanfaatan Rumah Pintar. Pertama, sejak dibangun pada tahun 2013, pemanfaatan Rumah Pintar masih sangat terbatas, hanya digunakan untuk kegiatan perpustakaan keliling yang dilakukan oleh J2Net setiap hari Sabtu mulai pukul 09.30-11.30 atau hanya 2 jam. Selain itu, Rumah Pintar dibiarkan kosong tanpa ada kegiatan. Ketika malam hari, rumah pintar lebih sering dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan yang cenderung negatif seperti berjudi, penyalahgunaan Napza, dan aktivitas negatif lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh anak yang tinggal di sekitar Rumah Pintar sebagai berikut: "Kan ini suka dipake buat nongkrong kalo malem minggu. Iya kak, beneran. *Kemarin* anak SMP sama SMA naik ke atas. Cewek, cowok. Rame-rame. Kita gak boleh ikut. Pada ngerokok. Saya diceritain mereka pada nonton *bokep* (porno) di hape" (Amr, 11 tahun).

Kedua, kondisi Rumah Pintar yang terdiri dari 2 lantai ini, terlihat sangat kumuh dan kotor. Di dalam ruangan, terdapat sampah yang berserakan seperti botol air mineral yang di dalamnya terdapat kotoran air kencing, kartu remi, puntung rokok, kemasan makanan, dan lain-lain. Pintu Rumah Pintar awalnya dikunci dan kunci dipegang oleh ketua RT X, tetapi sekarang ini pintu sudah tidak terkunci karena kunci telah dirusak. Kondisi ini yang menyebabkan Rumah Pintar dengan mudah dapat diakses oleh siapapun.

Ketiga, pemanfaatan Rumah Pintar lebih banyak digunakan oleh orang bukan warga RT dan kegiatan yang negatif. Sementara itu, warga setempat merasa '*enggan*' untuk memanfaatkan Rumah Pintar sedangkan anak-anak lebih sering bermain di sekitar Sungai Ciliwung. "Belum menjangkau semua masyarakat. Saya sendiri tidak tahu sebenarnya ngapain aja di sana. Yang datang selalu anak-anak, kadang ibunya, kadang orang lain tak dikenal. Kita gak dilibatkan buat kegiatan di situ." (Pak Wn, 43 tahun, Warga). Permasalahan krusial terkait berbagai aktifitas negatif yaitu Rumah Pintar yang dijadikan sebagai tempat transaksi NAPZA. Berdasarkan informasi dari ketua RT X dan tokoh masyarakat setempat, pengedar NAPZA berasal dari warga RT X. Berbagai permasalahan ini terkait dengan permasalahan keempat, yaitu terkait dengan tingginya konflik diantara beberapa kelompok.

Salah satu karakteristik dari masyarakat yang tinggal di RT X, terdiri dari beberapa kelompok yang mana antara satu kelompok dengan kelompok lainnya tidak rukun dan saling bersaing. Kelima, belum adanya rasa memiliki dari semua warga terhadap Rumah Pintar. Keenam, pengurus Rumah Pintar yang telah terbentuk belum berjalan dengan optimal.

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara mendalam dan kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat RW Y, khususnya RT X, memiliki harapan besar terhadap keberadaan Rumah Pintar. Mereka berharap Rumah Pintar dapat dijadikan sebagai tempat kegiatan bersama baik anak-anak, remaja, ibu-ibu, maupun bapak-bapak. Semua pihak dapat menggunakan Rumah Pintar untuk kegiatan positif seperti sebagai tempat pengajian, arisan, ruang pertemuan, dan juga tempat belajar dan bermain yang nyaman untuk anak-anak. Meskipun demikian, mereka juga belum memiliki inisiatif untuk mengelola dan memanfaatkan Rumah Pintar. Termasuk untuk urusan kebersihan, para warga setempat cenderung tidak acuh dan hanya mengandalkan pihak J2Net ataupun tim pengabdian dari Universitas Indonesia.

Sementara itu, beberapa potensi yang dimiliki masyarakat yang dapat berkontribusi positif terhadap pemanfaatan Rumah Pintar. Pertama, para pemuda di wilayah ini memiliki tingkat pendidikan yang baik, yaitu pelajar SMA maupun mahasiswa. Kedua, adanya beberapa komunitas dari luar yang melakukan kegiatan di Rumah Pintar, seperti J2Net dan Komunitas dongeng. Ketiga, adanya pasar emas modern, Cikini Golden yang kegiatan Corporate Social Responsibility ditujukan untuk Kampung Cikini-Ampun. Keempat, adanya kegiatan dari mahasiswa dari Universitas Indonesia dan Chiba University, Jepang. Kombinasi berbagai metode pengumpulan data menjadikan asesmen yang dilakukan menjadi lebih mendalam sehingga akar permasalahan dapat terpetakan.

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh tim yaitu melakukan perencanaan alternatif program. Dalam pertemuan dengan pengurus RT, RW, dan perwakilan pemuda, disampaikan berbagai temuan masalah yang terkait pemanfaatan Rumah Pintar yang dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan program. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Pak D sebagai penanggung jawab pengelolaan rumah pintar yang akan dibantu oleh remaja. Selain itu, rencana berikutnya yaitu perbaikan rumah pintar mulai dari pengecatan, pemasangan kunci pintu dan kawat, dan pemasangan listrik. Serta beberapa perlengkapan seperti: lemari, papan nama dan papan pengumuman, dan lain-lain.

Tahap berikutnya yang dilakukan yaitu implementasi berupa: pengecatan, pemasangan kunci, kawat, dan pemenuhan perlengkapan yang dibutuhkan dilakukan bersama dengan warga. Namun demikian untuk pemasangan listrik tidak dapat dilakukan karena belum ada

kesepakatan dari pengurus maupun warga mengenai teknis pengelolaannya. Di tahap ini, berbagai kendala ditemui yang berdampak terhadap keberlangsungan program.

Partisipasi Masyarakat dan Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang ditemui dalam proses pengembangan masyarakat pada kasus ini sudah ditemui sejak awal kegiatan. Kendala ini berasal dari internal tim pengabdian maupun dari masyarakat. Dari tim pengabdian terkait dengan proses engagement yang dirasa belum mendalam. Hal ini terjadi karena tim pengabdian masih belum dikenal oleh masyarakat, mengingat belum pernah terlibat dalam kegiatan sebelumnya. Proses engagement dirasa kurang karena dalam waktu yang relatif cepat kegiatan sudah dimulai. Proses engagement yang masih kurang berdampak terhadap rasa percaya dari masyarakat terhadap tim pengabdian. Kondisi ini yang menyebabkan masyarakat masih belum terlibat dalam prosesnya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pozzoni dan Kumar (2005) sedikitnya waktu yang dihabiskan dengan masyarakat membuat masyarakat tidak terlibat secara aktif.

Kendala dari tim pengabdian tidak menjadi satu-satunya penyebab rendahnya partisipasi masyarakat, tetapi berasal dari masyarakat itu sendiri. Kendala pertama terkait dengan karakteristik dari warga RT X yang terdiri dari beberapa kelompok dimana di setiap kelompok saling berkonflik. Oleh karena itu, muncul berbagai kecurigaan dari warga ketika pengelola Rumah Pintar berasal dari salah satu kelompok. Hal ini karena setiap kelompok memiliki tujuan yang berbeda terhadap keberadaan Rumah Pintar. Kondisi ini yang menyulitkan tim serta warga dalam menjalankan program yang sudah direncanakan.

Dalam kajian sebelumnya diketahui bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam proses pengembangan masyarakat. Namun demikian, pada kajian ini justru ditemukan bahwa pemimpin lokal belum berperan secara optimal. Pada saat pendirian Rumah Pintar, pimpinan RT dan RW, serta pengelola Rumah Pintar saat itu telah memiliki kesepakatan bersama terkait dengan pemanfaatan bangunan ini, sayangnya, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sepenuhnya. Pengelolaan Rumah Pintar lebih banyak diserahkan kepada tim pengabdian dari UI. Kondisi ini menggambarkan bagaimana peran pemimpin di wilayah ini untuk pemanfaatan Rumah Pintar masih cukup terbatas. Padahal, kemampuan pemimpin dalam menanggapi masalah yang dihadapi akan berkontribusi positif terhadap lahirnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang ada di masyarakat (Blejwas (2010); Kretzmann & Puntenney (2010)).

Kendala lain yang ditemui yaitu tidak adanya kepercayaan dari masyarakat setempat kepada pemimpin RT dan RW. Masyarakat tidak peduli dengan kegiatan yang sifatnya untuk bersama dan fokus terhadap urusan masing-masing terutama terkait aktivitas ekonomi. Warga melihat bahwa ketua RT sangat sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk memperhatikan permasalahan yang ada di RT X. Di sisi lain, ketua RT juga dinilai tidak tegas dalam mengatasi permasalahan yang ada, seperti Rumah Pintar yang tidak terkelola.

Tidak adanya kader yang berasal dari RT X menjadi salah satu kendala lain yang menghambat kegiatan pengembangan masyarakat. Beberapa orang yang memiliki kepedulian terhadap keberadaan Rumah Pintar sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sementara itu, ibu-ibu maupun remaja yang memiliki waktu lebih banyak sangat sulit dilibatkan dalam pengelolaan Rumah Pintar. Kondisi ini yang membuat tim menjadi kesulitan dalam berkoordinasi untuk pengembangan program.

Jika dilihat secara kasat mata, untuk kegiatan sosial seperti pemanfaatan rumah pintar wilayah ini sangat sulit diajak bekerja sama dan keterlibatan mereka sangat minim. Namun demikian, menariknya, untuk kegiatan-kegiatan ceremonial seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI dan peringatan lainnya, mereka sangat kompak, bahkan tiap tahun mereka selalu menjuarai

berbagai macam lomba. Akan tetapi untuk kegiatan pemanfaatan rumah pintar, diajak diskusi untuk duduk bersama bagaimana memanfaatkan rumah pintar sangat sulit.

Dari kondisi ini, menuntut tim untuk sangat fleksibel dan harus cepat beradaptasi dengan kondisi dan dinamika yang ada di masyarakat. Ada beberapa perencanaan yang akhirnya ditunda atau bahkan dibatalkan mengingat kondisi masyarakat tidak memungkinkan. Misalnya mengenai pemasangan listrik, sebagian warga saling curiga mengenai pemanfaatannya dan berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, rencana ini tidak dilaksanakan.

Dari kondisi di atas menunjukkan bahwa internal komunitas menjadi penghambat program pengembangan masyarakat yang sudah dijalankan. Jika mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Adi (2013), hambatan dari internal komunitas yang ditemui tim pengabdian yaitu terkait faktor predisposisi dan ketergantungan komunitas sasaran terhadap orang lain. Dalam hal faktor predisposisi, salah satu kondisi yang yaitu terkait dengan ingatan masa lalu dan persepsi yang telah terseleksi. Ingatan menonjol masa lalu dan persepsi yang telah terseleksi terlihat dari adanya kecurigaan dari warga ke sesama warga maupun ke tim pengabdian mengenai pemanfaatan rumah pintar. Kecurigaan ini dilatarbelakangi adanya pengalaman masa lalu rumah pintar dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kegiatan negatif.

Tidak hanya itu, ada ketergantungan komunitas sasaran terhadap orang lain, dalam hal ini tim pengabdian dari UI. Pengembangan masyarakat sudah dijalankan beberapa tahun oleh tim UI lainnya, yaitu dari arsitektur. Keberhasilan yang telah dilakukan oleh tim UI membuat warga menjadi sangat bergantung dengan UI. Hal ini sangat terlihat dari hasil survey mengenai harapan akan rumah pintar kedepannya. Sebagian besar warga menyerahkan ke UI baiknya rumah pintar akan seperti apa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam proses pengembangan masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan masyarakat. Tujuan dari pengembangan masyarakat akan terwujud ketika semua lapisan masyarakat terlibat aktif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan masyarakat masih belum berjalan optimal, salah satunya karena minimnya partisipasi dari masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua pihak, yaitu tim pengabdian maupun dari masyarakat. Kendala dari tim pengabdian berupa engagement sebelum kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan masih kurang dan strategi pendekatan yang diterapkan kurang tepat. Sementara itu, kendala dari masyarakat diantaranya: karakter masyarakat di pemukiman padat perkotaan memiliki kekhasan tersendiri, adanya konflik yang ada di tengah masyarakat, minimnya perhatian tokoh masyarakat dalam melihat potensi aset yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta minimnya peran dari tokoh masyarakat (pemimpin) yang belum dapat mendorong atau memobilisasi partisipasi masyarakat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin lokal, tidak adanya kader, dan belum adanya rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Rumah Pintar sebagai sarana bersama belum dirasakan oleh warga Masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, saran yang diberikan yaitu:

- Sebelum program dimulai, pendekatan (*engagement*) harus dilakukan lebih intensif dan membutuhkan waktu sehingga hubungan yang baik, saling percaya dan terbuka (*rapport*) antara warga dengan tim pengembangan masyarakat akan terbentuk.
- Perlu dilakukan pendekatan personal secara intensif ke tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dan berpotensi menghambat program. Walaupun bisa muncul perbedaan kepentingan, pendekatan ini dilakukan untuk akhirnya bersama-sama membangun kepercayaan dan kerjasama demi kelangsungan program.

- Semua *stakeholder* perlu memiliki persepsi dan tujuan yang sama mengenai program yang akan dijalankan
- Memaksimalkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dan kerjasama di antara tokoh masyarakat serta stakeholder terkait dalam membangun partisipasi masyarakat sebagai investasi untuk masa depan pengembangan di komunitas.
- Tim pengabdian harus fleksibel dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat setempat. Keterampilan menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat tidak didapat secara instan, diperlukan latihan dan pengalaman dalam berinteraksi dengan berbagai komunitas.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang telah mendanai kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui program Community Engagement Grants (CEGs) Area Based

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. (Rev. ed) Jakarta: PT PT Raja Grafindo Persada.

Ann Goetting (Eds). *Mobilizing Communities: Asset Building as a Community Development Strategies*. Temple University Press.

Badan Pusat Statistik. (2014). Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035. *Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1276>*

Blejwas, E.. (2010). Asset-based community development in Alabama's Black Belt: Seven strategies for building a diverse community movement. Dalam Gary Paul Green & Ann Goetting (Eds). *Mobilizing Communities: Asset Building as a Community Development Strategies*. Temple University Press.

Caritra, 2019. *Kampung Ramah Anak Pemenuhan Fasilitas Anak di Permukiman Padat Penghuni Kota Yogyakarta*. Diakses dari <https://www.caritra.org/2019/07/30/kampung-ramah-anak-pemenuhan-fasilitas-anak-di-permukiman-padat-penghuni-kota-yogyakarta/>

Wise, N., & Clark, J. (2018). The Future of Urban Renewal Further Enabling Community Participation through Policy and Practice. *Urban Renewal, Community and Participation*, 241. Diakses dari <https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-72311-2#page=249>

Habitat, U. N. (2016). *Slum almanac 2015–2016: tracking improvement in the lives of slum dwellers. Participatory Slum Upgrading Programme*. <https://unhabitat.org/slum-almanac-2015-2016>

Ife, Jim. 2013. *Community Development in an Uncertain World, (Vision, Analysis and Practice)*. Melbourne: Cambridge University Press.

Kamaluddin, R. (2004). Kemiskinan perkotaan di Indonesia: perkembangan, karakteristik dan upaya penanggulangan. *Bappenas*, Diakses dari <http://www.bappenas.go.id/node/48/2259/kemiskinan-perkotaan-di-indonesia-oleh--rustian-kamaluddin>.

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (2013). Indonesia: Kemiskinan Perkotaan dan Ulasan Program.

Kenny, Susan. (2006). *Developing Communities for The Future*. (3rd ed.). Victoria: Thomson

Macdonald, C. (2017). *The role of participation in sustainable community development programmes in the extractives industries* (No. 2017/28). WIDER Working Paper. Diakses dari <https://www.econstor.eu/handle/10419/161592>

Mayo, M. (1997). *Partnerships for regeneration and community development: some opportunities, challenges and constraints*. *Critical Social Policy*, 17(52), 3-26. Diakses dari <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026101839701705201>

Neuman, W. L. (2014a). *Basics of social research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson.

Neuman, W. L. (2014b). *Social Research Methods: qualitative and quantitative approaches*. (7th ed). Pearson

Poppo, Keith. 1995. *Analysing Community Work: it's Theory and Practice*. Buckingham: Open University Press

Pozzoni, B., & Kumar, N. (2005). *A review of the literature on participatory approaches to local development for an evaluation of the effectiveness of World Bank support for community-based and driven development approaches*. Diakses dari <http://documents1.worldbank.org/curated/en/137091468159592753/pdf/522330WP0cbd0c00Box379853B00PUBLIC0.pdf>

Rahayu, A. (2017). *Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Orang Tua Dengan Perilaku Pencegahan Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah di RW 02 Duren Sawit Jakarta Timur* (Doctoral dissertation, STIK Sint Carolus).

Ross, M. G., & Lippin, B. W. (1967). *Community organization; theory, principles, and practice*. New York: Harper & Row.

Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Stringer, E.T. (2007). *Action research* (3rd ed.). Los Angeles, CA: Sage Publications

Sumarnonugroho, (1991). *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Hanindito.

UNICEF. (2018). *Shaping urbanization for children: A handbook on child-responsive urban planning*. United Nations. Diakses dari <https://www.unicef.org/reports/shaping-urbanization-children>

Kretzmann, John P. & Punttenney, Deborah (2010). *Neighborhood Approaches to Asset Mobilization: Building Chicago's West Side*. Dalam Gary Paul Green & Ann Goetting (Eds). *Mobilizing Communities: Asset Building as a Community Development Strategies*. Temple University Press.